

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Perlakuan terhadap persediaan di pemerintah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) no 5 tahun 2010. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 219/PMK.05/2013 lampiran VI jenis persediaan dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan sifat pemakaiannya dan berdasarkan bentuk dan jenisnya. Persediaan disajikan menggunakan metode harga perolehan terakhir,

Peraturan gubernur jawa timur no 002 tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi daerah provinsi jawa timur yaitu persediaan diakui dengan pendekatan aset yaitu setiap pembelian persediaan dicatat di neraca, beban persediaan dicatat menurut inventarisasi fisik, jika terdapat perbedaan pencatatan menurut pengurus/penyimpanan barang dengan hasil stock opname dalam jumlah yang tidak material maka akan di berlakukan sebagai beban persediaan, namun apabila jumlah selisihnya ditemukan bernilai material maka akan diuji oleh auditor internal provinsi jawa timur

Persediaan pemerintah masih dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintah, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persediaan juga dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dalam pemerintahan termasuk aset lancar karena persediaan diharapkan segera dipakai dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Penulis tertarik untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas persediaan terhadap dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa timur apakah sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku sesuai dengan PSAP no 5 tahun 2010.

## 1.2 Landasan Teori

### 1.2.1 Pengertian Persediaan

Menurut Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 5 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sartono (2010:443), Persediaan umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan.

### 1.2.2 Metode Pencatatan Persediaan

Persediaan dapat dicatat dengan menggunakan 2 metode yaitu :

#### 1) Metode Pencatatan Periodik

Menurut Dyckman, Dukes, Davis (2000 : 381) mengatakan bahwa : Dalam sistem persediaan periodik, perhitungan periodik actual atas barang-barang yang ditangan pada akhir periode akuntansi ketika menyiapkan laporan keuangan. Barang-barang dihitung, ditimbang, atau jika tidak diukur, dan jumlahnya dikaitkan dengan unit biaya untuk memberi nilai persediaan.

*“ Under a periodic inventory system, a company determines the quantity of inventory on hand only periodically, as the name implies.”* (Kieso, et al, 2011:409) Dengan sistem pencatatan persediaan periodik penentuan kuantitas dan nilai persediaan dicatat secara periodik, misalnya satu bulan sekali atau satu periode akuntansi. Pada saat transaksi perolehan persediaan di debit rekening pembelian. Pada saat pengurangan persediaan karena penjualan, dikredit rekening penjualan.

Kemudian diadakan stock opname atau dilakukan perhitungan kembali penambahan dan pengurangan kuantitas dan nilai persediaan selama periode

tertentu kemudian dicatat nilai akhir persediaan di rekening persediaan (menggunakan jurnal penyesuaian).

Selama periode akuntansi perusahaan membeli barang persediaan dengan nilai yang berbeda-beda. Kemudian persediaan yang dikeluarkan dari gudang juga mengikuti arus yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan misalnya persediaan yang dibeli (masuk) pertama akan dikeluarkan pertama, atau barang persediaan yang dibeli terakhir akan dikeluarkan pertama, atau barang dikeluarkan tidak mengikuti aturan tersebut

## 2) Metode Pencatatan Perpetual

Menurut Stice (2014) Pencatatan persediaan dengan sistem perpetual merupakan sistem akuntansi dimana persediaan dicatat secara detail dengan menyertakan jumlah serta biaya setiap pembelian persediaan.

Menurut Sumarsan (2013) metode pencatatan perpetual adalah kondisi dimana perusahaan menggunakan akun “perusahaan” atau “persediaan barang dagang”. Setiap transaksi pembelian dan penjualan perusahaan akan melakukan pencatatan pada akun “persediaan” dan “persediaan barang dagang”. Pada metode pencatatan ini pencatatan dilakukan secara detail untuk setiap jenis persediaan yang disimpan. Pencatatan tersebut berisi:

1. Unit dan biaya pada awal persediaan
2. Unit dan biaya setiap pembelian
3. Unit dan biaya pada awal persediaan
4. Unit dan biaya barang yang ada pada setiap saat.

Metode perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan yang *up-to-date* terhadap barang persediaan. Perhitungan fisik persediaan minimal dilakukan

pada setiap akhir tahun, untuk menyesuaikan saldo persediaan menurut buku besar dengan saldo persediaan menurut perhitungan fisik persediaan

### **1.2.3 Akuntansi Pemerintahan**

#### **1.2.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

#### **1.2.3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002) menerangkan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

- a) Akuntabilitas di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).
- b) Manajerial Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan

kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

Pengawasan Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

### **1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui metode pencatatan persediaan pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Akuntansi Persediaan Pemerintah
3. Memperoleh pengalaman kerja dan berlatih menangani masalah-masalah dalam perusahaan yang mungkin nantinya akan dihadapi dalam dunia kerja.
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan dari program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

### **1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
  - a. Mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
  - b. Memberikan Pengetahuan, Wawasan, Pengalaman pada penulis yang nantinya akan berkontribusi dan terjun langsung pada dunia kerja
  - c. Memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Airlangga.
2. Bagi Almamater

- a. Menjadi sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
  - b. Sebagai sarana pembelajaran efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun ke dunia kerja langsung
3. Bagi Subjek Perusahaan
- Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga, baik dalam penyediaan tempat Praktik Kerja Lapangan, pengambilan data ataupun kerjasama dalam bentuk lainnya.
4. Bagi Pembaca
- a) Sebagai informasi kepada pembaca mengenai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
  - b) Sebagai sarana menambah pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.